

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis dan Yuridis Tentang Guru dan Siswa Dalam Lingkup Pendidikan

1. Tinjauan Tentang Guru

a. Pengertian Guru

Guru merupakan seseorang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik sekolah maupun luar sekolah. Sebagai seorang pengajar guru harus memberikan pengalaman mendalam mengenai pelajaran terhadap siswa-siswanya, dan juga harus dapat menjadi seorang instruktur yang dapat membimbing dan melatih siswanya menjadi paham terhadap apa yang sudah diajarkan. Peran guru yang menjadi sentral dalam dunia pendidikan menjadikannya sebagai garis terdepan dalam membentuk kebijakan, karakter dan program pada akhirnya akan ditentukan oleh guru itu sendiri.⁹ Adanya guru ditengah-tengah kehidupan membuat kita mempunyai seseorang yang dapat di jadikan contoh, diteladani oleh manusia untuk berkembang dan belajar, manusia tidak akan memiliki norma, agama dan budaya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan:

⁹ Syahrul Bahri, *Guru dan Anak Didik*, Malang, Rinela Cipta, 2009, Hlm 4

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”¹⁰

Guru memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang dimana guru sebagai peran utama dalam memajukan program pendidikan di sekolah.¹¹ Tenaga pendidik atau guru didalam Indonesia lebih dikenal dengan istilah pengajar, sebagai profesi pendidik guru mempunyai tugas khusus dalam berpartisipasi untuk menyelenggarakan pendidikan. Guru juga berperan sebagai penyampai materi ajar, pengetahuan, pengalihan, pengalihan keterampilan, serta merupakan satu-satunya sumber belajar. Tetapi pada zaman sekarang guru sudah berubah peran menjadi pengajar, pelatih, Pembina dan pembimbing. Dengan begitu guru mempunyai tanggung jawab lebih yang membuatnya memerlukan keahlian khusus. Karena hal itu profesi guru tidak dapat dikerjakan oleh sembarangan orang diluar bidang pendidikan. Sekalinya guru melakukan perbuatan yang dirasa salah, maka akan sangat berdampak terhadap profesi guru yang membuat tercorengnya dunia pendidikan di Indonesia.

Pengertian guru dari segi etimologi berasal dari Bahasa India yang berarti seseorang yang memberikan pelajaran tentang bagaimana cara lepas dari kesengsaraan. Sedangkan secara umum guru diartikan sebagai seseorang yang

¹⁰ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

¹¹ Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, Hlm. 139

mengembangkan kemampuan dan potensi dasar yang dimilikinya dengan maksimal untuk memfasilitasi peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Pengertian tersebut diharapkan agar guru dapat melakukan proses belajar mengajar baik di lembaga yang dibangun oleh pemerintah maupun di lembaga swasta. Dalam melakukan tugasnya di dunia pendidikan guru mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, yaitu:¹²

- a) Tugas Profesional, tugas yang berhubungan dengan profesinya yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
- b) Tugas Manusiawi, membuat guru mempunyai tugas untuk mengeluarkan potensinya semaksimal mungkin dalam mewujudkan dirinya agar dapat merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya, agar dapat menarik simpatik siswanya agar ingin menjadi idola siswa dan menjadikan tauladan bagi siswa-siswanya.
- c) Tugas kemasyarakatan, sebagai masyarakat dan warga negara seharusnya guru berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Keberadaan guru yang menjadi factor penentu yang tidak mungkin digantikan oleh komponen yang lain dalam kehidupan di masyarakat.

Guru Profesional dalam menjalankan profesinya sebagai penguasaan kompetensi harus dapat menguasai 4 (empat) kompetensi yang diantaranya

¹² Mochtar, Pedoman Bimbingan Guru dalam Proses Belajar Mengajar, PGK dan PTK Dep. Dikbud, Jakarta, 1992, Hlm. 32

kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Guru sebagai agen pendidik tersebut memperhatikan dengan baik tujuan dari pendidikan agar dapat menjadi pendidik yang profesional dengan menjalankan tugasnya melalui memberikan pelayanan dengan baik terhadap peserta didiknya. Pekerjaan profesional ini berbeda dari kelompok pekerjaan lain yang dimana pekerjaan profesional mempunyai:

- 1) Kemampuan teknis mengharuskan guru mempunyai kemampuan sebagai guru profesional yang diantaranya memiliki kemampuan tentang pelajaran, pedagogic dan kemampuan teknis pendukung.
- 2) Etika pelayanan merupakan sebuah komitmen untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan kliennya dengan baik.
- 3) Komitmen profesional merupakan adanya identitas kolektif yang kuat dari seorang tenaga pendidik.

Dalam hal ini ada beberapa kompetensi dalam ketentuan sebagai guru yang profesional yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Kompetensi Guru, merupakan kemampuan yang mutlak atau harus dimiliki oleh seseorang didalam setiap bidang yang dimilikinya. Hal tersebut tidak dapat di pisahkan dari profesi guru, yang dimana kompoensi profesional guru harus dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah perpaduan antara kemampuan profesional, teknologi, keilmuan,

¹³ Sofyan Syamratulangi, *Analisis Tingkat Ketercapaian Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru SMPN 1 HU'U di Kecamatan HU'U Kabupaten Dompu*, tesis, 2019, Hlm. 4-6

spiritual, dan sosial dengan begitu dapat dikatakan sebagai kompetensi guru. Pentingnya meningkatkan kompetensi guru sangat dibutuhkan karena pengembangan pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Komponen guru akan mengantarkannya menjadi guru profesional yang diidamkan oleh peserta didik. Guru yang mempunyai keahlian dan kemampuan ilmu memadai melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan

- b) Kompetensi pedagogic, kompetensi ini menjadi kompetensi yang mutlak diperlukan oleh guru karena pada dasarnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi pedagogic mengharuskan guru menguasai kekomponen-komponen yang tercantum dalam indikator kompetensi tersebut, ini diperlukan untuk pengembangan dirinya agar terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- c) Kompetensi professional, merupakan kemampuan guru dalam menguasai teori belajar secara luas dan mendalam memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standart kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi professional guru dapat didapat dengan berbagai cara yang salahsatunya dari mengikuti berbagai pelatihan guru. Dalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 dijelaskan bahwa pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan guru yang bertujuan untuk memelihara dan atau meningkatkan kemampuannya sebagai guru sesuai dengan

tuntutan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.¹⁴

- d) Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru, kompetensi yang diperoleh dari program sarjana atau diploma empat jelas akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengasah kemampuan gurunya tersebut. Kompetensi tersebut merupakan tolak ukur dari seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik, dengan salah satunya sebagai ukuran dari pencapaian dari kompetensi ini dengan terwujudnya pembelajaran yang terstruktur dan terarah dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Standar ukur pencapaian dari proses belajar mengajar apabila guru telah menghayati profesinya dengan benar dan baik melalui beberapa kriteria yang dimana guru mengenal dengan baik karakter dari peserta didiknya, menguasai materi ajarnya, dapat mengembangkan silabus dan dapat menggunakan teknologi untuk memajukan pembelajaran di sekolah.

b. Peran Guru

Peran guru telah dijelaskan oleh WF Connel yang berpendapat bahwa peranan dari guru yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Peranan Guru Sebagai Pendidik (nurturer), guru sebagai pemberi dukungan, bantuan dan dorongan, pengawasan dan pembinaan, serta tugas-tugas yang mendisiplinkan agar menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan

¹⁴ Lihat Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008

¹⁵ Adywinata Anwar, *Tinjauan Pidana Kekerasan Oleh Guru Terhadap Siswa Di SMA Negeri Makassar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, Hlm. 28-29

norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Diharapkan para siswa dapat menjadi disiplin dan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri untuk mengerti norma-norma yang hidup dimasyarakat dan guru sebagai pengontrol agar hal itu dapat terlaksana.

2. Peran Guru sebagai Model atau contoh, bahwasannya diharapkan guru dapat menjadi contoh atau model bagi siswanya, dengan begitu guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara dengan berpedoman dengan Pancasila.
3. Peran guru sebagai pembimbing dan pengajar, bahwa guru diharuskan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain diluar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi, spiritual dan memilih pekerjaan dimasyarakat.
4. Peran guru sebagai pelajar, yang dimana guru dituntut untuk menambah pengetahuan dan keterampiannya agar pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guru selalu dapat berjalan beriringan dengan kemajuan jaman dan teknologi.
5. Peran guru sebagai komunikator, membuat guru harus dapat berperan aktif didalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukannya. Dengan mengembangkan bidang-bidang yang dikuasai, guru diharapkan dapat lebih mendalami tentang kemampuan yang dia miliki tersebut.

6. Peran guru sebagai administrator, guru juga dituntut dapat menguasai administrasi dalam bidang pendidikan, karena guru harus dapat membuat perencanaan mengajar yang mencatat hasil dan membuat dokumen-dokumen yang di perlukannya untuk membuktikan bahwa dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Tinjauan Yuridis Tentang Guru

Berdasarkan peraturan yang ada mengenai berbagai tindakan yang telah diatur di dalam regulasi yang ada, yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru

Pada pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tentang tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangan.¹⁶

Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁷

¹⁶ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

¹⁷ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pasal 41 menjelaskan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan, diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.¹⁸

2) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA)

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa Guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswanya.¹⁹

2. Tinjauan Tentang Siswa

a. Pengertian Siswa

Sebelum mengetahui tentang siapa itu siswa alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu anak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan mengenai pengertian anak secara etimologis yaitu bahwa anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁰ Sedangkan menurut R.A. Kosnan menjelaskan bahwa anak merupakan manusia yang masih muda dalam umur muda dalam jiwa dan didalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh terhadap keadaan yang ada di sekitarnya.²¹

Setelah mengetahui tentang pengertian anak, maka siswa atau anak didik adalah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral

¹⁸ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

¹⁹ Andi Saputra, Yurisprudensi MA Guru Tidak Bisa Dipidana karena Mendisiplinkan Siswa, diakses pada 19 Januari 2020.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984, Hlm. 25

²¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005, Hlm.

dalam proses balajarmengajar, siswa diposisikan sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Karena siswa menjadi faktor penentu yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Siswa merupakan pelajar yang duduk dimeja setrata sekolah dasar (SD) maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA).

Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu oengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak, dan mandiri. Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu.²²

Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapati disimpulkan gahwa siswa adalah seorang anak yang derasda atau mengikuti proses belajar mengajar atau bisa disebut juga anak yang bersekolah untuk mengembangkan dirinya agar lebih baik lagi berdasarkan ilmu yang dia peroleh dari guru/tenaga pendidik yang meberikannya ilmu tersebut.

²² Lihat Dalam Penjelasan ayat 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Tinjauan Yuridis Tentang Siswa

Peraturan yang mengatur tentang siswa atau anak dalam melakukan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.²³

Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak hak yang berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi selayaknya, dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dari kekerasan dandiskriminasi terhadap anak.²⁴

Pasal 9 ayat (1) dan (1a) menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan

²³ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁴ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.²⁵

Berdasarkan pasal 54 ayat (1) dan (2) tentang pendidikan menjelaskan bahwa anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Di ayat duanya menyatakan bahwa perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.²⁶

3. Tinjauan Tentang Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁷ Beberapa ahli mengartikan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang

²⁵ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (1a) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Lihat Penjelasan Dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam mendewasakan dirinya melalui latihan dan pengajaran. Prof . H. Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld berpendapat bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha sengaja yang dipilih untuk membantu dan mempengaruhi dalam meningkatkan jasmani, ilmu pengetahuan dan akhlak untuk dapat membuat anak mencapai cita-cita dan tujuannya dengan semaksimal mungkin. Dengan begitu anak dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, masyarakat, bangsa dan negara. Selain dari hal tersebut bahwa pendidikan merupakan sebuah upaya membantu seorang anak agar dapat melakukan tugas dalam hidupnya secara mandiri, bertanggungjawab dan pendidikan dapat diartikan pula sebagai proses pendewasaan atau pembelajaran menuju dewasa.

Pendidikan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas masyarakat dan bangsa, karena dari pendidikanlah seseorang mendapat pembekalan diri untuk menghadapi segala kejadian yang akan dihadapinya. Harahap dan Poerkatdja menyatakan bahwa pendidikan merupakan perbuatan yang menimbulkan tanggungjawab moril dari segala perbuatannya yang dilakukan oleh orang tua secara sengaja. Maksud dengan orang tua yaitu orang tua dari anak itu sendiri atau seorang yang mempunyai kewajiban untuk mendidik seperti kiai, guru, dan pendeta. Dalam pendidikan ini seseorang disiapkan untuk menjadikannya generasi penerus bangsa yang baik dan integritas dalam negaranya, oleh sebab itu seorang pendidik harus

mempunyai sebuah sifat yang disiplin dan kesabaran didalam melakukan proses belajar mengajar.²⁸

Sebagai bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah pencapaian kebahagiaan dan keselamatan yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan kodratnya yang menuntut kehidupannya. Heidjarachman dan Husnah berpendapat bahwa pendidikan merupakan pengembangan kemampuan seseorang didalam mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuannya, dengan bisa mengatasi segala persoalan dirinya dengan mencari dan memutuskan solusi yang ada di sekolah maupun didalam kehidupan sehari-harinya. Notoadmodjo justru berpendapat jika pendidikan formal yang dilakukan didalam Organisasi dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dengan diarahkan menuju kepada tujuan dari setiap Organisasi tersebut.²⁹

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan disekolah dengan beranggapan bahwa sekolah sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Padahal dalam kenyataannya pendidikan dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

²⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan baru*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007, Hlm. 11

²⁹ Banny Keldrianto, *Penyebab Rendahnya tingkat Pendidikan Anak Putus Sekolah dalam Program Wanji Belajar 9 tahun Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*, jurnal, 2013

- 1) Pendidikan formal, merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 3 (tiga) jenis jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan non formal, adalah jalur pendidikan yang dilakukan diluar jalur pendidikan formal tetapi tetap dilakukan secara terstruktur dan berjenjang..
- 3) Pendidikan informal, pendidikan dilakukan oleh keluarga dan secara informal dilakukan di luar sekolah.
- 4) Pendidikan anak usia dini, merupakan pemberian rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani yang dilakukan agar anak siap untuk melakukan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi yang dilakukan sejak lahir hingga anak berusia 6 (enam) tahun.
- 5) Pendidikan jarak jauh, adalah gaya pendidikan yang dilakukan tidak didalam suatu ruangan antara pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda dengan dilakukan dengan teknologi.
- 6) Pendidikan berbasis masyarakat, merupakan penyelenggaraan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang didalamnya mengajarkan tentang sosial, budaya, aspirasi dan agama.³⁰

b. Jenis-jenis Jenjang Pendidikan

Pada dasarnya di Indonesia, kebanyakan dari masyarakatnya selalu memasukkan anak-anaknya kedalam pendidikan formal yang dimana dalam

³⁰ Lihat Dari Penjelasan pasal 1 ayat 11-16 UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidikan formil itu memiliki beberapa jenis jenjang pendidikan yang dimana jenis jenjang pendidikan itu sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Dimana pendidikan dasar ini merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang dimana pendidikan dasar ini berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat. Didalam pendidikan dasar ini siswa diajarkan terkait tentang basik dari pendidikan tersebut yang dimana sebuah karakter seorang anak ini dibentuk dan di poles dari sini, mulai dari akhlak, aqidah, dan juga kepribadian tentang nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar yang dimana pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Di dalam negara kita sendidi pendidikan menengah ini biasanya berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), dan berbagai bentuk sekolah yang sederajat. Dalam hal ini anak di didik untuk dapat mengetahui kemampuan mana yang sebenarnya dia kuasai atau dimana anak itu mengetahui kemampuannya untuk dapat di asah lebih dalam dan bisa menentukan lebih tinggi lagi jenjang pendidikan yang akan dipilihnya dengan berdasarkan kemampuan yang dia kuasai

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan di jenjang ini lebih dilaksanakan dalam system terbuka yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, ataupun universitas. Pada jenjang ini perguruan tinggi diwajibkan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi yang telah memenuhi pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang sedang diselenggarakannya. Dengan begitu pendidikan tinggi ini sangat berpengaruh terhadap karir seseorang yang sudah mendapatkan gelar sesuai dengan jalur pendidikan yang telah ditempuhnya.

B. Tinjauan Tentang Pendidikan

1. Pengertian Disiplin

Secara etimologis bahwa disiplin berasal dari Bahasa Inggris "*disciple*" yang berarti pengikut orang untuk belajar dibawah pengawasan seorang pemimpin atau penganut pengajaran, latihan dan sebagainya. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia bahwa disiplin adalah tata tertib (disekolah, kemiliteran dst), ketaatan (kepatuhan kepada peraturan), dan bidang studi yang memiliki objek, system dan metode tertentu. Adakalanya istilah disiplin

sebagai kepatuhan atau ketaatan yang lahir karena kesadaran dan dorongan dari dalam diri orang tersebut.³¹

Secara istilah disiplin adalah ketaatan terhadap aturan atau tata tertib. Tata tertib yang berarti seperangkat peraturan yang berlaku untuk membuat kondisi yang tertib dan teratur yang berisikan tentang kewajiban, larangan dan sanksi yang harus dipatuhi.³² Amir Daien menyatakan bahwa disiplin merupakan kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang berarti bahwa kepatuhan yang berdasarkan akan kesadaran tentang nilai dan peraturan-peraturan yang ada tersebut.³³

2. Unsur-Unsur Disiplin

Disiplin merupakan sebuah kebutuhan untuk seorang siswa yang tidak bisa diabaikan, karena itu untuk menunjang kehidupannya. Pembentukan sikap, perilaku, karakter yang baik itu berasal dari seseorang melakukan disiplin itu sendiri. Dengan demikian unsur-unsur disiplin dapat dijabarkan dalam beberapa point berikut ini yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Peraturan, yang dimana peraturan dapat dibuat atau ditetapkan oleh guru, orang tua, ataupun teman yang bertujuan menjadikan seorang anak menjadi lebih bermoral dengan membekali anak pedoman perilaku yang

³¹ Berdasarkan Penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

³² B. Suryo Subroto, *Dimensi-Dimensi Manusia dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1983. Hlm 181.

³³ Amir Danien Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pendidikan Malang*. Usaha Nasional. 1973. Hlm 142

³⁴ Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1999. Hlm 173-180

disetujui dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupannya masing-masing;

- b. Hukuman, dimana hukuman ini ada karena adanya kesalahan yang dimana seseorang yang melakukan kesalahan itu harus dihukum karena sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas atau melanggar nilai-nilai yang sudah ditetapkan didalam masyarakat atau didalam lingkup seseorang itu berada.
- c. Penghargaan, merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada seseorang karena sudah melakukan sesuatu hal dengan menghasilkan sesuatu yang baik dan dapat diberikan sebuah penghargaan. Dengan demikian penghargaan ini dapat diberikan jika seseorang melakukan hal-hal yang baik bagi orang banyak. Misalnya seorang anak meakukan perlombaan dan menang.
- d. Konsistensi, yang dimana konsistensi ini sangat diperlukan jika adanya sebuah pendisiplinana dengan tidak merubah apa yang seharusnya sudah ditetapkan. Nilai-nilai yang tekandung didalam pendisiplinan ini harus selalu konsisten karena untuk mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penyebutan Tindak Pidana didalam Undang-undang dahulunya dalam bahasa Belanda sudah dikenal dengan sebutan “Strafbaar feit”. Dengan berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam beberapa kata yang

digunakan menerjemahkan oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, delict, perbuatan pidana. Dalam berbagai perundang-undangan digunakan berbagai istilah *strafbaar feit* antara lain:³⁵

- a. Peristiwa Pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- b. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e. Tindak Pidana, istilah ini paling banyak di gunakan didalam peraturan perundang- undangan, antara lain:
 - 1) UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum.
 - 2) UU Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
 - 3) Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

³⁵ Tongat, S.H., M.Hum, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2012, Hlm. 91.

Berbagai istilah yang digunakan sebenarnya tidak membuat hal yang serius, jika penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Menurut Moeljatno istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya yang disamakan dengan strafbaarfeit tanpa adanya penjelasan. Sedangkan Prof. Moeljatno menyamakan kata strafbaar fiet dengan perbuatan pidana, membuatnya harus perlu melihat bagaimana sebenarnya arti makna dari strafbaarfiet itu terlebih dahulu. Bahwa menurut Van Hammel berpendapat bahwa srtafbaar fiet merupakan sebuah perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam wet, patut dipidana jika perbuatannya melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simons strafbaarfiet dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁶ Adapun alasan dari Simons bahwa strafbaarfiet harus dirumuskan seperti pendapatnya antara lain, sebagai berikut:

- a. Untuk adanya strafbaar fiet itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang harus dihukum;

³⁶ *Ibid*, Hlm. 92

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memnuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang, dan;
- c. Setiap strafbaar fiet sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.³⁷

Beralih dari kedua pendapat tesebut, dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit pada dasarnya mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Fiet dalam istilah strafbaarfiet mengandung arti sebuah tingkahlaku atau perbuatan.
2. Strafbbaarfiet dibuhungkan dengan tingkah laku yang dilakukan dengan kesalahan.

Pada point a dan b Moeljatno berpendapat bahwa berbeda dengan istilah perbuatan pidana, karena didalam perbuatan pidana lebih condong terhadap sifat dari perbuatannya saja yang dimana sifatnya hanya larangan yang jika dilanggar diancam dengan pidana. Keadaan batin dan hubungan batin antara pembuat dan pelaku tindak pidana itu yang menjadi patokan apakah seseorang itu di pidana ataukah tidak. Dari hal tersebut perbuatan pidana sebagai kelakuan dan akibat tidak selamanya relevan, karena ada perbuatan pidana yang hanya mempresyaratkan yang dilarang tanpa mempresyaratkan akibat untuk terjadinya yaitu perbuatan/ tindak pidana formil. Sedangkan

³⁷ Drs. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm. 185.

menurut Prof Mr. van der HOEVEN tidak setuju apabila perkataan strafbaar feit itu harus diterjemahkan dengan perkataan “perbuatan yang dapat dihukum” oleh karena itu bunyi pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana itu dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan³⁸

Secara doctrinal, hukum pidana mengenal dua pandangan terhadap perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Penjelasan yang di jabarkan oleh dua pandangan tersebut yaitu:³⁹

- a. Pandangan Monistis, merupakan sifat dari perbuatan yang dimana semua syarat dari adanya tindak pidana itu sudah terpenuhi. Didalam perbuatan atau tindak pidana dalam pengertian ini mencakup juga adanya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility*). Para sarjana juga memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu:
 - 1) Simons, menurutnya bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun tidak dengan sengaja dengan seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum merupakan tindak pidana.

³⁸ Ibid, Hlm. 192

³⁹ Tongat. S.H., M. Hum, *Op. Cit*, Hlm. 94-99

- 2) J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Wiryo Prodjodikoro, menurut beliau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis mengartikan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki arti yang berbeda. Monistis berpendapat bahwa tindak pidana itu mencakup satu kesatuan yang didalamnya terdapat *criminal act* dan *criminal responsibility*, berbeda dengan dualistis yang memandang bahwa kedua hal tersebut tidak ada didalam tindak pidana. Dengan demikian didalam pandangan ini untuk dapat disebut harus ada kesalahan atau pertanggungjawaban pidana untuk dapat disebut sebagai perbuatan tindak pidana. Berikut adalah pendapat batasan tentang tindak pidana yang diberikan oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu:

- 1) Pompe, dalam hukum positif strafbaar feit tidak lain adalah feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurutnya dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.
- 2) Moeljatno, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut pandangan yang sudah dipaparkan diatas tidak terlalu terlihat perbedaan yang cukup berarti. Kedua pandangan tersebut sepakat bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu tindak pidana harus ada perbuatan atau tindakan dari pidana itu sendiri (*criminal art*) dan juga pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dengan begitu membuat berbeda hanyalah dalam pandangan monistis yang berpendapat bahwa seluruh syarat yang melekat didalamnya sudah dapat dikatakan sebuah perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan sedangkan dari sudut pandang dualistis dia membedakan antara orang yang melakukan tindak pidana dengan perbuatan pidana tersebut..

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Dalam KUHP tindak pidana yang dapat unsur-unsurnya dapat dijabarkan menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimana unsur subjektif itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaku atau diri pelaku, niat atau didalam hati pelaku termasuk didalamnya. Unsur subjektif tindak pidana yaitu:

- a. Kesengaja atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau ogmerk merupakan tujuan dari perbuatan tersebut, seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pemalsuan, pemerasan, penipuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan atau Voorbedachte read seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut atau Vrees yang seperti dijelaskana didalam Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif ini lebih condong terhadap sebuah keadaan dimana melihat dari kenapa si pelaku melakukan tindakan tersebut, dengan melihat apa latar belakang dari perbuatan itu dilakukan. Unsur Objektif suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- 2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “kondisi dari Seorang Pegawai Negeri” didalam kejahatan jabana meneurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komoisiaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3. Kausalitas merupakan hubungan antara sebuah tindakan diartikan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat dari tindakan itu.⁴⁰

⁴⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, Hlm. 193-194

Menurut pendapat D. Simons suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dari penjelasan D. Simons diatas, telah didapatkan benang merah dari hal tersebut, bahwasannya Simons tidak memisahkan antara *criminal art* dan *criminal responsibility*. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan eks pasal 338 KUHP, tetapi diketahui orang yang melakukan pembunuhan itu tidak mampu bertanggungjawab, dikarenakan seseorang itu gila, maka dalam hal ini seseorang itu tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana, dikarenakan seseorang itu tidak memenuhi unsur ke lima bahwasannya orang tersebut tidak dapat bertanggungjawab. Oleh karena itu tidak ada tindak pidana, maka juga tidak ada pidana. Beda halnya dengan pendapat dari Moeljatno yang merumuskan unsur-unsur pidana hanya ada 3 (tiga) point saja yaitu:

1. Adanya perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)

3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).⁴¹

3. Subjek Tindak Pidana

a. Manusia sebagai Subyek Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang tindak pidana, maka kita perlu mengetahui siapakah yang harus bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan melihat pembahasan diatas tentang unsur-unsur tindak pidana, telah dijelaskan salah satu unsur tidnak pidana adalah perbuatan manusia, dengan begitu yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Manusia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Delik-delik dalam undang-undang pidana banyak kita jumpai yang diawali dengan kata-kata “Barang siapa” dapat kita lihat dari contoh beberapa pasal dibawah ini:
 - a) Pada pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - b) Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan

⁴¹ Tongat, S.H., M. Hum., *Op. Cit*, Hlm. 95-97

pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pengertian barang siapa dalam pasal-pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa barang siapa dapat diartikan atau dapat dimaknakan sebagai orang atau manusia.

2. Bahwa berdasarkan pasal 10 KUHP menunjukkan saknksi pidana yang dimaksud dalam pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada manusia. Dengan demikian yang dimaksud dalam pasal tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dapat berupa:
 - a) Pidana Pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan.
 - b) Pidana tambahan yaitu pecabutan hak-hak tertentu,, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
3. Syarat adanya kesalahan pada diri pelaku untuk dapat dijatuhkannya pidana menunjukkan, bahwa yang dapat bertanggungjawab adalh manusia, karena kesalahan yang berupa kesalahan ataupun kealpaan itu bersal dari sikap batin dalam diri manusia.

b. Korporasi/ Badan Hukum sebagai Subyek Tindak Pidana

Dalam hal ini badan hukum dapat disebut sebagai subyek hukum dikarenakan perbuatan dari badan hukum/ korporasi dalam hal ini diwujudkan melalui tindakan atau perbuatan manusia itu menjadi

perbuatan korporasi. Karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan untuk atau atas nama korporasi itu pada hakikatnya merupakan perbuatan korporasi yang harus dipertanggungjawabkan tetapi pertanggungjawaban pidana dalam hal ini hanya dibebankan oleh pengurus korporasi itu sendiri.⁴²



⁴² Ibid, 119